

PERDESAAN, MIGRASI DAN PERUBAHAN PENGHIDUPAN¹:

SEBUAH KAJIAN LITERATUR

Deni Mukbar²

Penghidupan dalam pengertian sederhana bermakna sebagai upaya yang dilakukan setiap orang untuk memperoleh penghasilan, termasuk kapabilitas mereka, aset yang dapat dihitung seperti ketersediaan dan sumber daya, serta aset yang tak bisa dihitung seperti klaim dan akses. Sementara itu, konsep penghidupan berkelanjutan dimaknai sebagai “kemampuan, aset (pasar, sumberdaya, klaim kepemilikan, dan aset) serta aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk menunjang kehidupan” (WCED 1987 dalam Chambers & Conway 1991: 9-12). Dengan kata lain, penghidupan dapat dipahami sebagai ketahanan untuk menunjang pemulihan atau perbaikan dari goncangan atau tekanan; kemampuan memelihara atau meningkatkan aset; dan ketahanan menyediakan peluang penghidupan untuk menyokong manfaat penghidupan generasi mendatang dalam skala lokal dan dalam jangka pendek atau panjang”

I. Sumber Penghidupan Perdesaan: Pertanian

a. Konsep *Livelihood* dalam Penelitian

Konsep Penghidupan memiliki keluwesan dalam memperhatikan gerak, cara, jalur hidup, bahkan hubungan sosial – termasuk relasi gender - yang mengandung makna kekuasaan antar orang ataupun antara orang dengan kelompok, institusi, serta kebijakan (de Haan dan Zoomers, 2005: 3-18). Peragaman penghidupan (*livelihood diversification*) memperjelas keluwesan tersebut dengan melihat kemudian apakah gerak, cara, jalur hidup, dan hubungan sosial tersebut merupakan strategi penjamakan penghidupan/ *multiple livelihood* (Bryceson, 2000) ataupun strategi bertahan/*survival strategies* (Start and Johnson, 2001: 7). Sementara itu, dalam modul yang dikeluarkan Food and Agricultural Organisation (FAO), *Rapid Guide for Missions Analysing Local Institutions and Livelihoods* yang disusun Carloni dan Crowley (2005), analisis penghidupan di satu sisi dikaitkan dengan berbagai guncangan, konteks kerentanan, dan perubahan-perubahan, baik karena kebijakan maupun karena alam; dan di sisi lain terkait dengan berbagai bekal yang dimiliki suatu satuan ekonomi yang memungkinkan atau tidak memungkinkan mereka mengembangkan siasat-siasat.

Poin penting dalam konsep penghidupan dapat dianggap sebagai strategi mempertahankan kelangsungan hidup. Pakpahan dan Pasandaran (1990, dalam Agusanty, *et.al.* t.th:7) menyebutkan bahwa masalah mempertahankan kelangsungan hidup berbeda-beda menurut derajatnya, mulai dari mempertahankan masalah hidup dan mati sampai dengan mempertahankan hidup agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti mampu bekerja secara normal sesuai dengan jenis pekerjaannya masing-masing. Lapangan pekerjaan yang tersedia bagi rumah tangga merupakan

¹ Tulisan ini merupakan bagian dari studi literatur dalam penelitian From Rural to Global Labor: Transnational Migration and Agrarian Change in Indonesia and the Philippines yang dilakukan Yayasan AKATIGA Bandung dan Department of Geography University of the Philippines, tahun 2009.

² Peneliti Yayasan AKATIGA.

sumber tersedianya pendapatan bagi rumahtangga yang bersangkutan. Seberapa luas tersedianya lapangan pekerjaan dapat dimanfaatkan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki setiap anggota rumahtangga akan menentukan derajat tingkat pendapatan bagi rumahtangga tersebut.

Pendekatan *livelihood* dapat diidentikkan dengan strategi mendapatkan nafkah. Tujuan seseorang memperoleh nafkah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kesamaan memperoleh manfaat pada masyarakat. Di sisi lain nafkah pun menjadi jaminan bagi seseorang untuk menggunakan segala kemampuan dan kekayaan yang dimilikinya, tanpa mengabaikan kelestarian alam, berorientasi kepada tanggung jawab untuk generasi mendatang, serta demokratisasi (Uphoff 2002; Warburton, ed. 1998; Chambers 1991). Berdasarkan pemaparan diatas, penulis memiliki penegasan bahwa *livelihood* dapat dimaknai sebagai strategi mencari nafkah, yaitu berbagai upaya yang dilakukan seseorang untuk memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dimilikinya untuk mendapatkan penghasilan sehingga mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya.

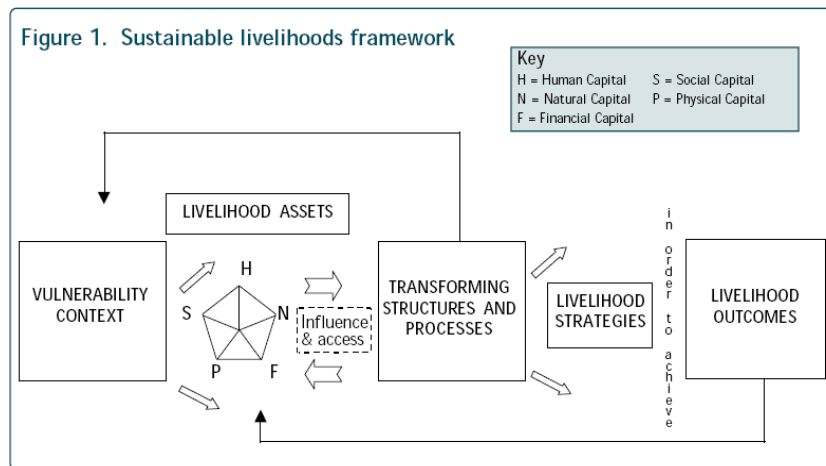
Dalam penelitiannya, Agusanty menyebutkan strategi mencari nafkah dalam ekonomi rumahtangga dapat diidentifikasi dalam tiga hal: (1) intensifikasi atau ekstensifikasi usaha yang digelutinya, (2) pola nafkah ganda (keragaman nafkah), dan (3) migrasi temporer. Untuk strategi pertama (intensifikasi atau ekstensifikasi) banyak terbangun melalui jaringan integrasi dari pola-pola kemitraan usaha yang dilakukan. Jaringan relasi dan hubungan sosial merupakan pencerminan hubungan antar status-status dan peran-peran dalam masyarakat.

b. Konsep Nafkah sebagai Mata Pencaharian, meliputi Pertanian dan Non Pertanian

Mata Pencaharian (nafkah) secara umum dapat dimaknai sebagai pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan dan menjadi realitas jaminan kehidupan seseorang atau negara untuk memanfaatkan segala kemampuan dan tuntutannya serta kekayaan yang dimilikinya. Melalui pekerjaan ini pula diharapkan masing-masing individu mampu mendapatkan penghasilan untuk membiayai kebutuhannya sehari-hari. Mata pencaharian meliputi pendapatan (baik yang bersifat tunai maupun barang), lembaga-lembaga sosial, relasi jender, hak-hak kepemilikan yang diperlukan guna mendukung dan menjamin kehidupan (Depdikbud 1983 ; Ellis 1998; Chambers dalam Nurmalinda 2002). Dengan kata lain sistem mata pencaharian adalah wujud karya manusia yang dilakukan guna pemenuhan kehidupan sehari-hari dan menjadi pokok penghidupan baginya.

Secara umum, aspek kehidupan dan penghidupan difokuskan pada kemampuan, termasuk sumber daya material dan sosial; modal; dan aktivitas sebagai komponen yang dapat menjelaskan mengapa masyarakat lokal masih bisa bertahan dan mengatasi kesulitan akibat goncangan hidupnya (Scoones 1998:5; Chambers dan Conway 1992 dan Ellis 2000, dalam Reynald dan Ali 2007:95).

Secara umum kerangka kerja penghidupan dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Sumber: DfID 1999

Berdasarkan bagan diatas, dapat dilihat bahwa aset, yang meliputi berbagai sumber kapital (Sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber keuangan, modal sosial, dan modal fisik) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Berbagai aspek tersebut layaknya menjadi kebutuhan yang diperlukan secara bersamaan untuk menunjang sekaligus menjamin keberlangsungan strategi penghidupan masing-masing individu. Ketersediaan akses terhadap sumber kapital pun berpengaruh terhadap proses pembentukan bahkan perubahan struktur dalam masyarakat. Lebih jauh lagi hal tersebut berpengaruh terhadap pendapatan dan keberlanjutan rumah tangga. Pemaparan diatas, secara garis besar, setidaknya memberi gambaran bahwa komponen-komponen penting dalam strategi mendapatkan nafkah (penghidupan) dapat dibagi menjadi empat hal, yaitu mata pencaharian, jaringan sosial, aset, dan kiriman (*remittances*).

c. Sumber Nafkah di Perdesaan

Pada banyak literatur ditegaskan bahwa sektor pertanian merupakan lapangan kerja yang menjadi tumpuan hidup masyarakat di perdesaan, terutama bagi kelompok miskin perdesaan. Bahkan tak perlu dipungkiri lagi fakta sejarah pembangunan Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertanian telah memberi kontribusi yang besar terhadap perubahan dalam perekonomian Indonesia. Pertanian juga memegang peranan penting dalam menyediakan lapangan pekerjaan sebagian penduduk, menyediakan bahan baku bagi sektor yang berkembang, menghemat devisa negara maupun sebagai tempat pasar bagi industri yang berkembang. Berbagai program yang diprakarsai pemerintah meningkat dengan pesat serta menyebar ke seluruh pelosok desa hingga mampu meningkatkan produktivitas serta meningkatkan penerimaan nyata rumah tangga petani. Namun demikian, gambaran pertanian sebagai tulang punggung perekonomian perdesaan pun kondisinya tampak menyedihkan. Sebagian besar pelaku di sektor pertanian ternyata hanya menjadi buruh semata karena ketiadaan tanah yang mereka miliki, kalau pun memiliki jumlahnya relatif kecil (tuna kisma). Sementara itu, para pemilik modal besar banyak masuk ke desa menggeser status kepemilikan lahan dari kelompok miskin (Pranadji dan Hastuti 2004:77; Chalid 2006:1-2; Eko 2008:25; Haryono 2008:1). Dengan kata lain, peningkatan tersebut tidak otomatis diikuti dengan peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat petani secara merata. Pemanfaatan program dan inovasi teknologi pertanian hanya mampu dinikmati kalangan petani pemilik modal semata. Sementara petani gurem dan buruh tani masih saja berkubang dibawah garis kemiskinan. Para

petani miskin masih tetap sulit menjangkau pemanfaatan teknologi pertanian dan prasarana pertanian akibat rendahnya penguasaan aset lahan dan permodalan.

Kehidupan ekonomi petani di perdesaan dikhawatirkan semakin terjepit. Ketersediaan lahan semakin terbatas dan produk andalan yang masih relatif rendah pun semakin sulit didapatkan. Kondisi seperti ini bukan tidak mungkin menyebabkan sulitnya menopang harapan perekonomian pertanian di perdesaan setempat. Oleh karena itu, peningkatan investasi untuk usaha pertanian hanya mungkin dilakukan di bagian pengolahan atau pemasaran hasil. Hanya sayangnya, kegiatan sektor ini lebih sektoranya dikuasai oleh pelaku-pelaku ekonomi dari luar desa (Pranadji dan Hastuti 2004:86).

Di sisi lain, pandangan terhadap kemampuan pertanian sebagai penopang perekonomian masyarakat perdesaan pun masih layak diperhatikan. Salah satu kasus yang memperlihatkan pertanian sebagai “jaring pengaman” bagi masyarakat perdesaan adalah ketika momentum krisis ekonomi terjadi, khususnya yang terjadi medio tahun 1997-an. Dampak krisis menyebabkan sebagian masyarakat desa yang bekerja migran terpaksa kembali ke desa asalnya karena perusahaan tempat mereka bekerja gulung tikar. Para pekerja yang kembali ke desa asal tersebut cenderung memiliki keterampilan yang berbeda dengan yang dimiliki rata-rata angkatan kerja di perdesaan. Sehingga kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang sesuai bagi mantan migran tersebut sangat terbatas bahkan tidak dijumpai. Hal ini membuat sebagian besar di antara mereka masuk ke pasar tenaga kerja pertanian sebagai alternatif, karena memang kegiatan di sektor pertanian tidak memerlukan keterampilan khusus. Namun demikian, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang baru tersebut lebih banyak pada jenis-jenis kegiatan di sektor pertanian. Beberapa alasan dominan yang mendasari mengapa pekerja memilih dan melakukan kegiatan tersebut antara lain karena belum ada kesempatan kerja yang lebih baik dan sesuai dengan pendidikan. Disamping itu, rendahnya penghasilan yang diterima dari kegiatan sekarang juga merupakan alasan yang mendasari mereka ingin mencari kegiatan lain (lihat Nurmanaf,et.al. 2000).

Para pekerja yang kembali ke desa asal tersebut cenderung memiliki keterampilan yang berbeda dengan yang dimiliki rata-rata angkatan kerja di perdesaan. Sehingga kesempatan kerja dan berusaha yang sesuai bagi mantan migran tersebut sangat terbatas bahkan tidak dijumpai. Hal ini membuat sebagian besar di antara mereka masuk ke pasar tenaga kerja pertanian sebagai alternatif, karena memang kegiatan di sektor pertanian tidak memerlukan keterampilan khusus. Beberapa alasan dominan yang mendasari mengapa pekerja memilih dan melakukan kegiatan tersebut antara lain karena belum ada kesempatan kerja yang lebih baik dan sesuai dengan pendidikan.

Berbagai program yang diprakarsai pemerintah meningkat pesat serta menyebar ke seluruh pelosok desa hingga mampu meningkatkan produktivitas serta meningkatkan pendapatan nyata rumah tangga petani. Namun demikian, gambaran pertanian sebagai tulang punggung perekonomian perdesaan pun kondisinya tampak menyedihkan. Sebagian besar pelaku di sektor pertanian ternyata hanya menjadi buruh karena ketiadaan tanah yang mereka miliki, kalau pun memiliki jumlahnya relatif kecil (tuna kisma). Sementara itu, para pemilik modal besar banyak masuk ke desa menggeser status kepemilikan lahan dari kelompok miskin (Pranadji dan Hastuti 2004:77; Chalid 2006:1-2; Eko 2008:25; Haryono 2008:1). Dengan kata lain, peningkatan tersebut tidak otomatis diikuti dengan peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat petani secara merata. Pemanfaatan program dan inovasi teknologi pertanian hanya mampu dinikmati kalangan petani pemilik modal semata.

Sementara petani gurem dan buruh tani masih saja berkubang dibawah garis kemiskinan. Para petani miskin masih tetap sulit menjangkau pemanfaatan teknologi pertanian dan prasarana pertanian akibat rendahnya penguasaan aset lahan dan permodalan.

Kehidupan ekonomi petani di perdesaan dikhawatirkan semakin terjepit. Ketersediaan lahan semakin terbatas dan produk andalan yang masih relatif rendah pun semakin sulit didapatkan. Kondisi seperti ini bukan tidak mungkin menyebabkan sulitnya menopang harapan perekonomian pertanian di perdesaan setempat. Oleh karena itu, peningkatan investasi untuk usaha pertanian hanya mungkin dilakukan di bagian pengolahan atau pemasaran hasil. Hanya sayangnya, kegiatan sektor ini lebih sektoranya dikuasai oleh pelaku-pelaku ekonomi dari luar desa (Pranadji dan Hastuti 2004:86).

d. Perubahan Sumber Penghidupan

Kegiatan ekonomi perdesaan tidak semata-mata melandaskan diri pada sektor pertanian. Berbagai aktivitas dan usaha lainnya pun turut mempengaruhi ekonomi perdesaan. Pemikiran ini berdasarkan pada konsep “diversifikasi penghidupan” sebagai strategi bertahan hidup rumah tangga perdesaan di negara-negara berkembang (Ellis 1999 dalam Chapman dan Tripp 2006:1). Pertanian memang masih dianggap penting tapi bagi sebagian orang desa tetap saja mencoba mencari kesempatan lain untuk menjaga bahkan meningkatkan kestabilan pendapatan mereka. Asumsi penganekaragaman penghidupan didasari kerangka aktivitas orang miskin di perdesaan yang ditentukan oleh penguasaan aset-aset meliputi social, manusia, keuangan, lingkungan alam, dan modal fisik (Carney 1998 dalam Chapman dan Tripp 2006).

Salah satu bentuk penghidupan yang terdapat di perdesaan adalah sektor non-pertanian. Perhatian terhadap aktivitas non-pertanian sebenarnya bukanlah hal baru bagi penduduk perdesaan. Bahkan, kombinasi pekerjaan di pertanian dan non-pertanian pun sudah umum dijumpai di perdesaan, khususnya di Jawa. Sawit (1979:9 seperti dikutip Mubyarto 1985) beralasan bahwa munculnya pilihan pekerjaan non-pertanian merupakan dampak antara kesempatan kerja dan pendapatan, antara lain karena: a) tidak cukupnya pendapatan di sektor pertanian; b) pekerjaan dan pendapatan usaha tani umumnya amat musiman, sehingga perlu menunggu waktu relatif lama mendapatkan hasil/pendapatannya; c) Usaha tani banyak mengandung resiko dan ketidakpastian; dan d) Kesempatan kerja dan pendapatan non-pertanian menjadi penting untuk kelompok rumahtangga buruh tani dan petani gurem, sebagai kelompok termiskin³.

Penyebab yang melatarbelakangi terjadinya kondisi tersebut, antara lain karena anggapan bahwa sektor pertanian beresiko tinggi dan memerlukan biaya tinggi. Karena itu, orang-orang desa, kecuali yang memiliki lahan luas dan modal yang cukup, menjadi enggan untuk menggarap sawah (Chrysanti 2007; Dona, dkk 2008: 60; Dede Mulyanto, dkk 2009, akan terbit). Persoalan lain yang memperkuat pernyataan tersebut adalah konteks munculnya perubahan di sektor pertanian akibat adanya “Revolusi Hijau”, sebagai program modernisasi atau intensifikasi yang dijalankan pemerintah Orde Baru untuk mendukung pembangunan pertanian. Program revolusi hijau dan revolusi teknologi pangan berhasil meningkatkan

³ Lihat penelitian White (1976) dan Hart (1978) yang menemukan bahwa petani miskin cenderung bekerja lebih lama dibandingkan dengan kelompok kaya (petani berlahan luas) dan mereka tidak terlibat dalam pekerjaan yang berproduktivitas rendah, seperti industri rumahtangga.

produktivitas pangan hingga 5,6% dan memungkinkan tercapainya swasembada pangan pada tahun 1984. Dikemukakan pula bahwa, terjadinya ketimpangan penguasaan lahan dan pendapatan salah satunya lebih dikarenakan perbedaan akses antar golongan petani terhadap modal dan teknologi (terkait kemampuan SDM antar wilayah). Program tersebut setidaknya berusaha melibatkan petani kecil yang diupayakan agar mampu mengadopsi berbagai program pembangunan pertanian. Bahkan proporsi terdasar yang hendak dijangkau adalah petani dengan luasan lahan < 0,5 ha. Pembangunan pertanian yang dilaksanakan pemerintah salah satunya mampu membawa hasil swasembada beras bagi negara Indonesia pada tahun 1984 (Faryadi 2007:4-7; Sajogyo 1993, dalam Elizabeth 2007:31; Haryono 2008:12).

Dibalik manfaat revolusi hijau untuk meningkatkan produksi pertanian, ternyata terselip dampak negatif bagi kehidupan masyarakat secara luas. Pengenalan revolusi hijau ternyata menyebabkan terjadinya perubahan pola produksi, khususnya pertanian. Proses produksi pertanian mulai menggunakan mesin dengan tujuan untuk mencapai efisiensi kerja. Misalnya mulai digunakannya traktor, penggantian ani-ani dengan arit untuk memanen padi, menyebabkan tenaga kerja perempuan di sawah tergantikan laki-laki, atau dikenalkannya pupuk berbentuk tablet. Dalam konteks sosiologi perdesaan, alih-alih mendorong keterlibatan para petani, justru menyebabkan ketergantungan petani kecil dan buruh tani pada tuan tanah dan pada input pertanian yang mahal dari luar, seperti bibit, pupuk, dan pestisida, serta melebarkan *gap* antara petani yang mengusahakan lahan baik dan yang mengusahakan lahan piasan (marginal) (Elizabeth 2007:31; Achmaliadi 2007:7; Notohadiprawiro 1994:5). Dengan demikian, dapat digambarkan bahwa pada masa lampau penduduk pedesaan pada umumnya hidup dengan sistem subsisten, tetapi paradigma modernisasi telah mengubah *mode of production* dari tidak berorientasi keuntungan ke berorientasi pada keuntungan. Dengan perkembangan-perkembangan yang ada di pedesaan dalam kenyataannya untuk kasus-kasus desa tertentu terutama di Jawa dari karakteristik dan fisik menjadi sulit membedakan antara desa dengan kota.

Di sisi lain, kondisi tersebut mendorong pula terjadinya konflik bersifat struktural vertikal yang bercirikan konflik-konflik lokal dan sporadis. Pada masa ini, respon petani tidak lagi melakukan perlawanan diam-diam, namun sudah berubah menjadi perlawanan fisik, walaupun kuatnya represif birokrasi dengan dukungan militer membuat petani tak berkulit. Sementara pada waktu yang bersamaan, kelompok buruh tani dan petani bertanah sempit yang tidak mencapai skala ekonomi secara pasti “terusir” dari desanya sendiri. Mereka terpaksa migrasi ke kota-kota terdekat untuk berburu pekerjaan-pekerjaan di sektor informal, baik sebagai migran musiman maupun migran permanen (Tjondronegoro, 1999, dalam Syahyuti t.th:10).

Pilihan kerja yang relatif dapat dilakukan di dalam desanya tampaknya masih terkait dengan sektor pertanian karena secara umum pertanian merupakan sektor utama di perdesaan. Salah satu kecenderungannya adalah rumahtangga-rumahtangga di perdesaan Jawa (khususnya) yang membuka alternatif lapangan kerja baru di sektor non-pertanian, di tengah-tengah semakin bertambahnya tenaga kerja dan kemungkinan tidak tertampung di sektor pertanian. Bahkan Manning (1987; dalam van Velzen 1992:1) menunjukkan banyak pula rumahtangga-rumahtangga yang sekaligus mengkombinasikan pekerjaan sebagai buruh-tani dengan berbagai pekerjaan lain di sektor non-pertanian. Munculnya sektor industri kecil⁴

⁴ Industri di perdesaan dibedakan menurut skala usaha, yaitu menurut jumlah pekerja tetap (BPS, 1986) dan skala permodalan (Anonim, 1987). Dengan dua ukuran tersebut, dibedakan: a) industri rumah tangga dengan pekerja

sebagai alternatif berusaha dan bekerja di luar sektor pertanian pun menjadi konteks yang penting disoroti karena dapat mengatasi kesenjangan struktur perekonomian di Indonesia. Di samping itu, industri kecil dipandang penting untuk dikembangkan karena memiliki banyak peran, antara lain, karena dapat menciptakan peluang berusaha dengan pembiayaan relatif murah; berperan dalam meningkatkan dan memobilisasi tabungan domestik; serta dapat berkedudukan komplementer terhadap industri besar dan sedang (Saleh 1986 dirujuk Sumarti 1991:1).

Proses diversifikasi usaha ini pun dapat dilakukan dengan tetap memanfaatkan sektor pertanian. Sektor usaha yang dapat dikembangkan antara lain adalah arena perdagangan dan jasa. Sektor perdagangan yang banyak disoroti adalah perdagangan komoditi pertanian yang telah berkembang sejak tahun 1960-an (Hardjono 1990). Munculnya lapangan kerja di sektor perdagangan komoditi ini berkorelasi positif dengan hasil sektor pertanian. Oleh karena itu, penyediaan lapangan kerja di sektor perdagangan pertanian ini dapat terus dipertahankan melalui keberlanjutan pertumbuhan kuantitas produk pertanian (Hardjono 1990). Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pengembangan sektor pertanian tidak mudah dilakukan. Walaupun Indonesia terkenal sebagai negara agraris, tapi upaya pengembangan sektor pertanian menghadapi kendala kemerosotan lingkungan.

e. Migrasi dan Ekonomi Perdesaan

Di sisi lain, mobilitas generasi muda merupakan aspek yang dinamis untuk mencari lapangan kerja. Seorang pemuda dapat saja berpindah dari satu lapangan usaha ke lapangan usaha lainnya. Generasi muda desa umumnya memilih pekerjaan yang dapat memberikan upah rutin, baik itu sebagai buruh pabrik, karyawan toko dan salon, pegawai negeri sipil, dan sebagainya. Upah rutin memungkinkan pekerja yang telah menikah untuk menjamin keberlanjutan hidupnya, dan bagi yang belum menikah untuk menabung (modal untuk menikah) dan membeli barang yang sifatnya konsumtif, seperti telepon genggam dan pakaian model mutakhir, perawatan tubuh dan rambut di salon (bagi perempuan) dan mengkredit motor (laki-laki). Hampir tidak ada yang menggunakan pendapatannya untuk aktivitas-aktivitas 'produktif'. Sementara itu, dari sisi industri, sama halnya dengan masalah perburuhan di tempat lain, perempuan muda menjadi pilihan bagi pabrik dengan alasan produktivitas lebih tinggi dibanding buruh tua dan tidak banyak menuntut kenaikan gaji dan kesejahteraan, serta tidak sering pindah-pindah kerja (Lihat studi Chrysantini 2007).

Perpindahan usaha dan perubahan status pekerjaan yang dilakukan setidaknya dipengaruhi empat faktor yang mendorong, yaitu: 1) area pendidikan, besar kecilnya penghasilan berkaitan erat dengan penguasaan pendidikan; 2) area penghasilan, kegiatan ekonomi atau pekerjaan sangat menentukan penghasilan, selain itu juga memberikan 'cap' atau status sosial; 3) area status kegiatan ekonomi atau pekerjaan (*occupation*); dan 4) area kapabilitas sosial pekerja muda, meliputi penampilan kepribadian, latar belakang kekerabatan, serta etnis. Peningkatan kegiatan di luar sektor pertanian diasumsikan muncul antara lain karena terjadinya pergeseran nilai-nilai di perdesaan yang memandang rendah bekerja sebagai buruh tani, terutama bagi generasi muda. Mereka tampaknya lebih tertarik oleh terbukanya

kurang dari 5 orang dan modal usaha kurang dari 1 juta; dan b) industri kecil dengan pekerja tetap 5-19 orang dan modal usaha 1-10 juta (dalam Sumarti 1991)

kesempatan kerja di luar pertanian dengan pendapatan yang lebih baik (Hargiono 2000:38; Arwani 2001:128).

Hubungan ekonomi antara suatu wilayah dapat dipahami dengan beberapa cara pandang. Salah satunya adalah pandangan Galtung (1971) yang membedakan antara *centre*, sebagai pusat pertumbuhan dengan *periphery*, sebagai yang terbelakang. Hal ini berlaku untuk hubungan keluar ataupun di dalam suatu wilayah. Hubungan yang dihasilkan tersebut digambarkan telah menguntungkan masyarakat di pusat-pusat secara keseluruhan, dan merugikan mayoritas masyarakat di daerah pinggiran (Andri 2006). Tanpa disadari, sejak lama kondisi pembangunan desa-kota kita menggambarkan konstruksi mengenai tata hubungan ekonomi domestik yang timpang. Desa telah menjadi komoditas empuk bagi penghisapan surplus ekonomi pusat-pusat pembangunan di kota. Prospek ekonomi rakyat pedesaan sangat dikhawatirkan akan bertambah suram pada masa yang akan datang, jika perilaku elit kekuasaan di seluruh tingkatan tidak mengalami perubahan pola pikir pemihakan terhadap rakyat di desa.

Sementara itu, ada pula anggapan bahwa migrasi penduduk dari sektor pertanian di perdesaan berlangsung akibat adanya investasi dari sektor manufaktur dan jasa yang selama ini masih terfokus di kota/pusat. Ketika kegiatan di perkotaan mampu menawarkan pendapatan tinggi kepada penduduk desa yang bermigrasi, di titik itu pula kecenderungan sektor pertanian akan mengalami kekurangan pekerja (Arief 1995, dalam Andri 2006).. Kondisi itu dapat menyebabkan interaksi antara aktor-aktor ekonomi, baik antar maupun intra sektor, telah menambah keruh keadaan dengan adanya proses pengambilan keputusan politik yang tidak berpihak kepada rakyat di perdesaan. Sehingga sektor pertanian, yang sebagian besar bangsa kita ini menggantungkan hidupnya, jauh dari perannya sebagai pondasi pembangunan yang sesungguhnya. Di lain sisi, sektor manufaktur semakin tidak memiliki keterkaitan dengan sektor primer, yaitu pertanian

Pergerakan migrasi menembus perbatasan kewilayahan telah dilakukan sejak zaman lampau (Breman dan Wiradi 2002). Banyak alasan yang menyebabkan orang-orang melakukan migrasi, baik itu untuk menghindari konflik, bencana alam, hingga menjadi upaya mencari kehidupan yang lebih baik untuk terlepas dari kemiskinan. Pola seperti ini menunjukkan betapa kuatnya kontrol orang tua terhadap anak-anaknya (INSTRAW 2005:3; Deans, et.al.2006:1; Deshingkar 2006). Di sisi lain, pada beberapa literatur tampak adanya anggapan bahwa masyarakat desa sulit berkembang karena "kematian" budayanya. Kondisi ini terjadi karena tidak tepatnya pendekatan pembangunan yang digunakan selama ini. Salah satu alasan yang menjadi latar belakangnya adalah keinginan menunjukkan kemajuan di bidang ekonomi masyarakat secara luas. Disadari atau tidak, pemikiran seperti itu mendorong berbagai program pembangunan yang sektor perkotaan. Hal ini dapat berimplikasi pada terjadinya ketimpangan regional baik yang bersumber dari perbedaan kondisi demografis, budaya, maupun model pembangunan ekonomi yang diterapkan, termasuk sumber daya manusia di pedesaan, pun menjadi bagian faktor penarik terjadinya peningkatan arus migrasi dari desa. Akibatnya, kemiskinan masyarakat desa tumbuh dengan subur karena tidak ada proses pembangunan yang mengutamakan wilayah desa baik secara fisik berwujud infrastruktur yang baik maupun pola kesadaran akan arti pengtingnya kesamaan hak di mata hukum. Perbedaan model pembangunan ekonomi yang diterapkan acapkali karena konsekuensi pesatnya peningkatan pendapatan sebgai penduduk yang memiliki akses pada pembangunan ekonomi – berhadapan dengan sebagian besar penduduk yang bertambah miskin akibat tidak memiliki

akses pembangunan ekonomi tersebut. (Tjiptoheriyanto 1997; Tacoli 1998; Pranadji dan Hastuti 2004:2).

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa tingginya tingkat migrasi dari perdesaan secara ekonomi pun dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi perdesaan yang tidak lebih kompetitif dibandingkan dengan ekonomi perkotaan. Anggapan tersebut diperkuat dengan penetapan dalam kebijaksanaan pembangunan nasional, mengenai standar kemiskinan yang disusun oleh pemerintah berupa pengelompokan masyarakat berdasarkan keluarga sejahtera dan pra-sejahtera dengan indikator-indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan berada dibawah masyarakat perkotaan (Nugroho 2006:2). Di sisi lain, rendahnya tingkat kesejahteraan wilayah perdesaan disebabkan beberapa ciri, antara lain: rendahnya tingkat produktivitas kerja, masih tingginya angka kemiskinan, dan rendahnya kualitas permukiman perdesaan.

Salah satu isu penting terkait dengan migrasi adalah dampak ekonomi, khususnya aspek remitan. Penggunaan istilah “ekspor tenaga kerja” memunculkan harapan agar para pekerja migran membawa remitan tidak hanya bagi keluarganya tetapi juga untuk negara. Pemerintah bisa saja mendapat “keuntungan” dari pengiriman remitan, seperti pemotongan remitan untuk digunakan dalam penyediaan sarana pelayanan umum. Secara makro pun berdampak pada beberapa dampak strategis sisi perspektif nasional, yaitu: 1) peningkatan devisa negara; 2) peningkatan keterampilan kerja; dan 3) pengurangan masalah pengangguran (Mantra, Kasnawi, dan Suharmadi 1986; Mantra, dkk 1989:82; Mantra 2000, dalam Nugroho 2006:36). Sementara itu, Cursor (1981, dalam Nugroho 2006:37) menunjukkan bahwa tujuan pokok pengiriman remitan adalah digunakan untuk: 1) membantu keluarga; 2) peningkatan hidup keluarga; 3) membantu migran potensial di daerah asal dengan cara mengirim uang untuk ongkos bermigrasi; 4) membayar utang; dan 5) untuk investasi.

Dampak penggunaan remitan untuk pembangunan ini menjadi satu isu yang dapat diperdebatkan dalam konteks kebijakan pembangunan. Bahkan, keterkaitan antara migrasi dengan remitan ini dianggap sebagai bentuk penyesuaian ekonomi yang sebenarnya terhadap kelompok miskin dalam sebuah negara. Beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa remitan yang diperoleh para pekerja migran, umumnya dikirimkan ke desa asal, diharapkan dapat menjadi penghasilan yang bisa diinvestasikan dan digunakan ketika mereka kembali, sehingga mampu meningkatkan status mereka di dalam masyarakatnya. (Chant 1998:12; Deans, et.al. 2006; Ramos 2002, dalam Portes 2007:74).

Remitan memiliki dampak positif terhadap di tataran ekonomi lokal (meningkatkan konsumsi ekonomi, membawa peningkatan permintaan barang dan jenis pekerjaan lainnya). Lopez-Cordoba dan Olmedo (2006:18-19) berargumentasi bahwa “Remitan membantu rumah tangga keluar dari kemiskinan, menurunkan angka kematian, dan meningkatkan pencapaian tingkat pendidikan...remitan dapat digunakan sebagai bentuk investasi dalam proses produksi yang menguntungkan. Hal itu pun membuktikan mengenai hubungan positif antara remitan dengan bentuk investasi. Rumah tangga menerima remitan, sebagian kecil digunakan untuk konsumsi, dan sebagian besar lagi diinvestasikan, khususnya untuk investasi sosial, seperti pendidikan dan perumahan (Farrant, et.al 2006, dalam Deans, et.al. 2006:4). Pandangan seperti itu diperkuat pula dengan pernyataan Mantra, et.al. (1989:80-81) yang menunjukkan kesimpulan secara umum tentang pola investasi pendapatan migran, yaitu:

- a. Sebagian besar investasi digunakan untuk investasi material. Hal ini menggambarkan keinginan untuk memiliki barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, salah satunya sebagai simbol status sosial masih berperan penting bagi sebagian migran.
- b. Penggunaan investasi untuk pendidikan pun menjadi salah satu yang cukup penting bagi sebagian migran. Buktinya adalah tingginya tingkat pendidikan anak/adik para migran.
- c. Sebagian kecil migran melakukan investasi pendapatan dalam bentuk investasi modal, baik untuk pembukaan usaha atau pun pengembangan usaha. Paling banyak usaha yang dilakukan adalah bentuk warung-warung kecil. Sesuai dengan pendapatannya yang kecil, bentuk usahanya pun relatif kecil.
- d. Sementara itu, bentuk investasi sosial untuk menyantuni orang tua malah kurang nampak

Kondisi tersebut diatas menunjukkan bahwa remitan lebih banyak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar konsumsi rumahtangga, masih jauh digunakan untuk pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Sangat jarang remitan digunakan sebagai sumber pembiayaan investasi atau kegiatan produktif lainnya. Di samping dampak secara ekonomi, mobilitas penduduk pun membawa dampak sosial budaya.

Kondisi ini terjadi antara lain terkait intervensi nilai budaya baru yang dibawa kaum migran dari daerah tujuannya. Gambaran negatif penggunaan remitan dalam rumahtangga pekerja migran, antara lain konsumsi barang-barang mewah berlebihan. Kondisi ini setidaknya bisa menjadi pemicu semakin menajamnya perbedaan antara penerima remitan dan bukan penerima, bahkan bisa saja memunculkan kecemburuan sosial dan konflik, hingga menyebabkan terjadinya inflasi di tingkat lokal (Mantra, dkk 1989:86; Setiadi 2002; Deshingkar 2004; Mayers 1998 dan Ruiz-Arranz 2006, dalam Deans, et.al. 2006:4). Apabila ditelaah lebih lanjut sebenarnya biaya yang dibutuhkan menjadi pekerja migran pun tidak sedikit. Beberapa diantaranya memang biaya yang tidak terlihat secara nyata (*hidden cost*), misalnya biaya yang diberikan kepada calo-calo tenaga kerja agar mereka dapat bekerja di tempat tujuannya. Mulyanto (2009; akan terbit) menunjukkan kondisi calon tenaga kerja migran yang harus kehilangan tanah warisannya karena membutuhkan biaya untuk bekerja.

Di sisi lain, biaya-biaya sosial (*social cost*) yang harus dibayar para pekerja migran selama mereka bekerja pun perlu diperhitungkan. Secara umum, biaya-biaya sosial yang harus dibayar para pekerja migran selama mereka berada di negara tujuan, antara lain seperti; perpisahan sementara dengan keluarga, suami (para TKW) yang mungkin berpaling pada wanita lain, perubahan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, ketegangan dalam keluarga migran, bahkan perceraian dengan suami. Pemahaman tentang dampak negatif migrasi perlu mendapat perhatian yang cukup (Wirawan 2006:15-16; Deans, et.al.2006:2). Penelitian tentang perempuan migran kembali dari Arab Saudi (Sukamdi. et. al. 2001) di Yogyakarta menunjukkan bahwa migran kembali mengalami berbagai persoalan sosial dan psikologi. Di negara tujuan mereka memperoleh berbagai perlakuan tidak senonoh. Dalam perjalanan pulang, migran menjadi sasaran perampokan, dan ketika mereka sampai di tempat tujuan, mereka harus menyesuaikan dengan permasalahan adaptasi sosial dan psikologi. Mungkin benar bahwa keuntungan ekonomi yang mereka terima pada dasarnya tidak sebanding dengan pengorbanan-pengorbanan yang harus dilakukan oleh migran.

f. Migrasi dan Usaha Kecil

Upaya pengembangan peluang kerja sektor non-pertanian ini menjadi sorotan penting berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk menambah penciptaan alternatif pekerjaan baru bagi masyarakat perdesaan. Harapan lebih jauh, pengembangan peluang kerja di sektor non-pertanian yang berorientasi pada perdesaan, khususnya industri pengolahan komoditi pertanian, adalah mencegah semakin meningkatnya arus migrasi ke perkotaan (Hardjono 1990).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkembangan industri kecil di perdesaan merupakan hasil dari proses industrialisasi, urbanisasi, dan perkembangan ekonomi (Anonim 1988 dirujuk Sumarti 1991:4). Proses perkembangan industri kecil dan munculnya tipe pengusaha industri kecil, akan berkorelasi dengan keberadaan tipe pengrajin kerajinan tradisional yang terlibat lebih jauh dalam membentuk barang konsumsi (menggunakan bahan dan sumber daya lokal) untuk memenuhi kebutuhan lokal⁵. Ciri umum industri kecil digambarkan sebagai unit ekonomi/usaha keluarga (rumah tangga). Beberapa kasus menunjukkan industri ini dikelola oleh perempuan, sebagai istri; laki-laki, sebagai suami; atau perempuan dan anak-anaknya.

Dilihat dari konteks perkembangan usahanya, jenis industri berbentuk usaha keluarga ini, di satu sisi memberikan keluwesan (fleksibel) dalam pembagian kerja serta pengelolaan waktu bekerja. Namun, di sisi lain, kegiatan usaha tersebut cenderung tidak memisahkan keuangan rumah tangga dengan keuangan usaha, sehingga terkadang tercipta kondisi usaha yang tidak konsisten karena modal usaha terpakai untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Pelaku industri kecil pun sedikit sekali memiliki keleluasaan dalam produksi dan perdagangannya. Hal ini terjadi karena pelaku industri kecil ini masih memiliki ketergantungan pada pihak yang lebih besar (misalnya pedagang perantara), sehingga hampir sepenuhnya kekuasaan pun berada di tangan perantara tersebut (Smyth 1986; van Velzen. 1992).

Seperti sudah dikemukakan sebelumnya, dampak krisis yang terjadi medio 1997-an menyebabkan banyak perusahaan yang gulung tikar. Kondisi ini menyebabkan banyak pula tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dampak lebih jauh, PHK ini menyebabkan sebagian tenaga kerja migran kembali lagi ke daerah asalnya (Tjandraningsih, *et.al.* 2008; Dona *et.al.*2008). Berbagai kondisi yang menyebabkan tenaga kerja terlempar dari sektor formal menyebabkan mereka beralih menuju sektor informal, terutama perdagangan dan jasa akibatnya, persaingan di sektor informal semakin ketat. Bagi buruh yang tidak memiliki peluang memasuki sektor informal perkotaan pun akhirnya memilih kembali ke desa-desa asalnya. Manning (2000:126, dalam Breman dan Wiradi 2002:5) berkesimpulan bahwa sebagian besar pekerja yang kehilangan pekerjaan telah menemukan pekerjaan di lapangan pertanian. Pandangan ini pun dibenarkan oleh beberapa pendapat lainnya. Asumsi bahwa pertanian dapat berfungsi sebagai lapangan kerja yang dapat menampung buruh-buruh yang menumpuk di sektor-sektor ekonomi yang lain itu diilhami oleh pandangan yang dianut oleh banyak orang bahwa angkatan migran yang monda-mandir di antara pedalaman pedesaan dan kutub-kutub pertumbuhan di perkotaan itu tidak pernah meninggalkan pekerjaan mereka

⁵ Bentuk industri kecil di Indonesia memiliki keragaman jenisnya. Dalam keragaman itu terdapat keragaman dalam hal penggunaan teknologi, pola pekerjaan, ciri-ciri produksi, orientasi pasar, pengelolaan keuangan dan besarnya modal investasi; sehingga masalahnya makin kompleks.

semula (lihat Breman dan Wiradi 2004:5). Lalu kemanakah para tenaga kerja migran lain yang tidak mampu terserap di pertanian?

Sebagian buruh migran yang kembali ke desa asalnya ternyata kesulitan terserap di sektor pertanian. Selain karena daya serap sudah jenuh, krisis juga menyebabkan rumah tangga petani cenderung menggunakan tenaga kerja keluarga dari pada tenaga kerja upahan. Akibatnya, para tenaga kerja tersebut memasuki sektor-sektor pekerjaan non-pertanian yang bersifat informal, seperti jasa ojek, buruh serabutan, dagang kecil-kecilan, sopir tembak. Pilihan kerja di sektor informal perdesaan pun tidak semudah yang diperkirakan. Di sisi lain, mereka harus bersaing dengan tenaga kerja yang sebelumnya memang sudah memasuki arena kerja yang sama (AKATIGA 1999:10-13).

II. Usaha Kecil dan Strategi Bertahan di Masa Krisis

Salah satu bentuk penghidupan di sektor informal perdesaan adalah usaha kecil dan mikro (Anonim. 2008). Sebenarnya banyak kalangan menganggap bahwa sektor usaha kecil ini cukup signifikan dalam menyokong perekonomian Indonesia dan bisa mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kepercayaan ini didukung gambaran sampai tahun 2002-an bahwa secara umum usaha kecil bisa bertahan sementara usaha besar mengalami penurunan karena membutuhkan bantuan dari pihak lain, seperti suntikan dana dari lembaga-lembaga keuangan maupun pemerintah. Mulyanto (2006) menyatakan bahwa usaha-usaha kecil dan mikro merupakan jentik-jentik usaha yang selama ini berada di posisi paling akhir pembangunan, ternyata memiliki harapan untuk memutar kembali roda-roda ekonomi nasional pada masa krisis. Keyakinan ini pun disepakati oleh berbagai kalangan, baik ekonom kerakyatan, pejuang reformasi, atau peneliti ekonomi dari World Bank. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kegiatan usaha kecil dan mikro bisa menjadi salah satu sumber penghidupan alternative di tengah menghilangnya penghasilan para pekerja migran. Munculnya kepercayaan terhadap kemampuan usaha kecil untuk “lepas” dari krisis ini didasari oleh fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan politisnya yang sangat strategis sehingga usaha kecil tercatat memiliki proporsi 99% dari seluruh unit usaha dan mempunyai daya serap sangat besar.

Tak dapat dipungkiri mengenai fakta lain menunjukkan usaha mikro, kecil, dan menengah ternyata juga mengalami kesulitan berkembang atau mencapai tahap akumulasi modal. Realita menunjukkan bahwa hubungan antarpelaku usaha, khususnya usaha mikro, dengan aktor lainnya ini menyebabkan terjadinya sentralisasi pasar usaha mikro, mulai dari penyediaan input (sumber modal) sampai pada pemasaran produknya. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha mikro cenderung melakukan kegiatan usahanya sebatas bersifat subsisten⁶ dan sulit berkembang atau melakukan akumulasi modal. Keterbatasan pelaku usaha kecil memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya produktif tersebut inilah yang menyebabkan muncul kondisi pengeksploitasian kelompok usaha kecil oleh pihak-pihak lain yang lebih kuat. Namun, perbedaan akses dan kontrol terhadap sumber daya produktif belum tentu menyebabkan eksploitasi, karena eksploitasi baru terjadi ketika kelompok yang menguasai akses dan kontrol terhadap sumber daya produktif itu menentukan aturan main sendiri untuk mengakumulasi

⁶ Subsisten yaitu kegiatan usaha yang cenderung hanya memenuhi kebutuhan hidup semata dan belum mampu mengakumulasi modal untuk pengembangan usahanya Molyoutami & Susilowati 2003).

keuntungan dirinya dan mengalihkan resiko kepada kelompok lain (Suyudi, dkk 2003; Widyaningrum 2003).

Namun, pada beberapa kondisi, pelaku usaha kecil pun dapat melakukan akumulasi pendapatan rumahtangganya. Mulyoutami & Susilowati (2003) menunjukkan bahwa akumulasi dalam rumahtangga di perdesaan dapat terjadi dengan adanya sumber pendapatan lain dalam rumah tangganya, baik melalui diversifikasi usaha⁷ per individu maupun mata pencaharian lain dari setiap anggota rumah tangga. Adanya proses subsidi silang dari berbagai pendapatan dalam rumah tangga mendorong terjadinya investasi berupa perbaikan rumah, pendidikan dan kesehatan anak, dan lainnya.

Konteks krisis moneter dalam penelitian AKATIGA pun berkembang ke aras investasi skala besar yang melemah. Kondisi inilah yang memberikan kesadaran bahwa ternyata usaha kecil bisa menjadi sektor yang dapat berperan penting untuk investasi dan penyediaan lapangan kerja (Faraday, dkk. 2004). Peran pemerintah, melalui kebijakan-kebijakan untuk menciptakan iklim ekonomi politik yang kondusif, diharapkan dapat mendorong investasi masuk dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Resmi Setia (2005) menunjukkan bahwa strategi-strategi untuk meningkatkan perluasan kesempatan kerja sudah ditawarkan oleh berbagai lembaga pemerintah Bappenas, Depperindag, dan Kemenkop UKM) atau lembaga internasional (USAID, GIAT, ILO, dsb). Di titik ini muncul perdebatan tentang kebijakan ekonomi yang tepat untuk mencapai tujuan itu. Idealnya, usaha kecil dan usaha besar bisa bersama-sama menjadi pilar ekonomi Indonesia.

Penelitian medio tahun 2004 menunjukkan konteks ekonomi global yang mengalami krisis memberikan dampak pada semakin melonjaknya jumlah dan variasi jenis usaha dan serapan tenaga kerja perempuan⁸. Dewayanti & Chotim (2004) menunjukkan bahwa di tengah-tengah krisis, usaha kecil-mikro memberi harapan bagi kelompok miskin untuk bertahan hidup. Kegiatan usaha di sektor mikro ini menunjukkan kedekatannya dengan perempuan. Kondisi ini sebenarnya dapat memberikan peluang bagi perempuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan produktif. Namun, dalam harapan itu masih banyak masalah yang menghambat kelangsungan usahanya. Khusus bagi perempuan, hambatan-hambatan itu tidak hanya dari sisi usaha tapi juga dari relasi gender yang sudah menjadi tradisi.

Referensi

- Achmaliady, Restu. 2007. "Pemetaan Partisipatif Sebuah Gerakan ?" dalam Tantangan Masa Depan Gerakan Pemetaan Partisipatif di Indonesia (Kabar JKPP No. 12, Januari 2007). Bogor. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif.
- Andri, K.B. 2006. "Perspektif Pembangunan Wilayah Pedesaan" dalam jurnal Edisi Vol.6/XVIII/Maret 2006 [<http://io.ppi-jepang.org/article.php?id=153>]

⁷ Diversifikasi usaha adalah kemampuan pelaku usaha mikro untuk mencari penghasilan lain. Proses diversifikasi usahanya, seperti bertani, beternak, berladang atau membuka warung (Molyoutami & Susilowati 2003).

⁸ Walaupun fenomena perempuan bekerja dan berusaha, terutama dalam skala mikro, merupakan fenomena lama dalam kelompok-kelompok marjinal dan miskin.

- Anonim. 2008. Lapangan Kerja Minim, Pekerja Migran Naik” diakses dari [<http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=3&artid=402>].
- Breman, Jan C. and Gunawan Wiradi (2002). *Good Times and Bad Times in Rural Java*. Leiden, KITLY Press.
- Chalid, Ida Rahmy. 2006. “Peranan Perempuan Tani dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Petani Miskin (Studi Kasus Keluarga Petani Sawah Tadah Hujan di Desa Bonto Mate’ne Kecamatan Mandai Kabupaten Maros)”. Tesis Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Chambers, Robert & Gordon R. Conway. 1991. *Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century*. IDS Discussion Paper 296. Institute of Development Studies.
- Chant, Sylvia. 1998. “Households, Gender and Rural-Urban Migration: Reflections on Linkages and Considerations for Policy.” In *Environment and Urbanization*, Vol. 10, No. 1, April 1998:5-22 [<http://sagepub.com>].
- Chapman, Robert dan R. Tripp. 2006. “Background Paper on Rural Livelihood Diversity and Agriculture” dalam [<http://www.rimisp.cl/agren04/docs/BackgroundPaper3.doc>].
- Deans, F. Linda L., dan K. Sen. “Remittances and Migration: Some Policy Considerations for NGOs” dalam INTRAC Policy Briefing Paper No. 8, November 2006
- Deshingkar, Priya. 2004. “Understanding the Implications of Migration for Pro-poor Agricultural Growth” paper prepared for the DAC POVNET Agriculture Task Group Meeting, Helsinki, 17 – 18 June, 2004.
- Deshingkar, Priya. 2006. *Internal Migration, Poverty and Development in Asia*. Briefing Paper ODI London: Overseas Development Institute.
- Dewayanti, R. & Erna E. Chotim. 2004. *Marjinalisasi dan Eksploitasi PUK di Pedesaan Jawa*. Bandung: Akatiga.
- Dona, Maria, et.al. 2008. *Main Otak dan Main Otot: Identitas dan Pengorganisasian Buruh di Komuniti (Seri Laporan Penelitian AKATIGA No. 03)*. Bandung: Yayasan AKATIGA.
- Eko, Sutoro. 2008. *Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa*. Working Paper IRE’S INSIGHT. Yogyakarta.
- Elizabeth, Roosganda. 2007. Fenomena Sosiologis Metamorphosis Petani: Ke Arah Keberpihakan pada Masyarakat Petani di Pedesaan yang Terpinggirkan Terkait Konsep Ekonomi Kerakyatan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 25 No. 1, Juli 2007 : 29 – 42. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Faraday, dkk. 2004. *Usaha Kecil dan Masa Depan Perekonomian Indonesia (Redaksi Jurnal Ansos volume 9 No. 2 Agustus 2004)*.
- Faryadi, Erpan. 2007. *Impor Bahan Pangan dan Sempitnya Lahan Pertanian dalam dalam Berita Kaum Tani, Edisi I Agustus 2007*.

- Hardjono, Joan. 1990. *The Dillema of Commercial Vegetable Production in West Java*. Bandung. Proyek Penelitian Sektor Non Pertanian Pedesaan Jawa Barat, *Project Working Paper Series No. B-2*, Pusat Studi Pembangunan IPB dan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup ITB.
- Hargiono, Sri. 2000. "Mobilitas Sosial dan Semangat Berusaha Pekerja Muda di Kota Kupang" dalam *Buletin Penduduk dan Pembangunan LIPI*, Vol. XI, No.2-3, Agustus - September 2000. Hal. 37 - 62.
- Haryono, Dwi. 2008. "Dampak Industrialisasi Pertanian terhadap Kinerja Sektor Pertanian Dan Kemiskinan Perdesaan : *Model CGE Recursive Dynamic*" Disertasi Program Pascasarjana IPB (tidak dipublikasi).
- INSTRAW. 2005. "*Gender, Remittances and Development: Research Gaps and Future Priorities*" Presentation to Conference of Women Leaders, September 27th 2005, Haifa, Israel
- Manning 1987. *Rural Economic Change and labour Mobility: A Case Study from West Java*, in *Bulletin of International Economic Studies*, vol. 23, no.3.
- Mulyanto, Dede, et.al. 2009. *Kapitalisasi dalam Penghidupan Perdesaan*. Bandung: Yayasan AKATIGA.
- Notohadiprawiro, Tejoyuwono. 1994. *Pelingkung Pembangunan Pertanian di Indonesia*. Kuliah Umum Ikatan Senat mahasiswa Pertanian Indonesia, Yogyakarta, 9 Desember 1994. *Repro Ilmu Tanah UGM 2006*.
- Nugroho, Wahyu Budi. 2006. *Analisis Dampak Remitan Tenaga Kerja Wanita terhadap Pengembangan Desa: Studi Kasus di Desa budiharja, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung*. Tesis pada Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota. Bandung: ITB [tidak dipublikasi].
- Nurmanaf, A.R., A.S. Bagyo, R.N. Suhaeti, Roosganda dan Sugiarto. 2000. "Sektor Pertanian sebagai Kegiatan Sementara Bagi Migran di Pedesaan" dalam *Buletin AgroEkonomi*, Volume 1, Nomor 1, November 2000. [http://pse.litbang.deptan.go.id/download.php?gid=BAE_1_1_2000_0.pdf&pub=0]
- Portes, Alejandro. 2007. "*Migration, Development, and Segmented Assimilation: A Conceptual Review of the Evidence*" dalam *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 2007:73-97 [<http://ann.sagepub.com/cgi/content/abstract/610/1/73>]
- Pranadji, T dan E.L. Hastuti. 2004. "Transformasi Sosio-Budaya dalam Pembangunan Pedesaan" dalam *Jurnal AKP* . Volume 2 No. 1, Maret 2004 : 77-92. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Setiadi dan Sukamdi. 2002. *Migrasi Internasional: Strategi Kelangsungan Hidup pada Era Krisis Ekonomi* [Versi lengkap paper ini akan terbit dalam *Jurnal Populasi* Bulan Desember 2002 dengan judul "*Is International Migration A Way Out Of Economic Crisis?*"]
- Setiadi. 2002. "*Is International Migration A Way Out Of Economic Crisis?*" dalam *Jurnal Populasi* Bulan Desember 2002.

- Sumarti. 1991. Pembentukan Modal Industri Kecil Logam: Studi Kasus Desa Cibatu, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi.
- Suyudi, dkk. 2003. Pasar yang Adil Bagi Usaha Kecil (Jurnal Ansos volume 8 No. 1 2003).
- Syahyuti. T.th. Pengaruh Politik Agraria terhadap Perubahan Pola Penguasaan Tanah dan Struktur Pedesaan di Indonesia. [Paper sebagai tugas kuliah mata ajaran Perubahan Sosial di IPB Bogor].
- Tacoli, Cecilia. 1998. *"Bridging the Divide: Rural-Urban Interactions and Livelihood Strategies"* materi dalam Natural Resource Advisors Conference, Department for International Development's (DFID) (Sparsholt, 5-8 July 1998).
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1997. Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widyaningrum, dkk. 2003. Pola-Pola Eksploitasi Terhadap Usaha Kecil. Bandung: Akatiga
- Wirawan, Ida Bagus. 2006. Migrasi Sirkuler Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri: Studi Tentang Proses Pengambilan Keputusan Bermigrasi oleh Wanita Pedesaan di Jawa. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya [tidak dipublikasi].